



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEDY DIANTOLANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 259446

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KOTA PADANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 352 m<sup>2</sup> di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.  
650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 340.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI  
Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
330.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 32.250.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 748.726.200

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.261.672.703

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.532.648.903

**III. HUTANG** Rp. 130.897.660

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.401.751.243

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARTEN YUNUS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 422847

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/266 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/278 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 242.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 177.000.000
2. LAINNYA, DAIHATSU BLINDVAN S401RV HP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 54.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.746.000.000

**III. HUTANG** Rp. 546.538.450

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.199.461.550

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.